

ANALISIS VIBES PENDIDIKAN DI KABUPATEN GOWA DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK

Suryani Jihad¹, Juanda Nawawi², Nur Indrayati Nur Indar³, Muhammad Tang⁴ & Muhammad Akmal Ibrahim⁵

¹ Department of Doctoral Public Administration, Hasanuddin University

E-mail: suryani.jiahd@parahikma.ac.id

² Department of Doctoral Public Administration, Hasanuddin University

E-mail: juandanawawi1808@gmail.com

³ Department of Doctoral Public Administration, Hasanuddin University

E-mail: indrayatinurunhas@gmail.com

⁴ Department of Doctoral Public Administration, Hasanuddin University

E-mail: muhtangabdullah@yahoo.co.id

⁵ Department of Doctoral Public Administration, Hasanuddin University

E-mail: muhakibuh62@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi kebijakan pendidikan di Kabupaten Gowa, dengan fokus pada implementasi program-program unggulan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui analisis kualitatif, penelitian ini menyoroti hubungan antara berbagai program, seperti Pengelolaan Pendidikan, Pembinaan Perpustakaan, dan Pengembangan Kurikulum, dengan kebijakan pendidikan yang lebih luas. Meskipun terdapat peningkatan partisipasi sekolah dari 78% pada tahun 2019 menjadi 85% pada tahun 2022, tantangan signifikan tetap ada, terutama dalam hal infrastruktur dan distribusi sumber daya manusia. Kesenjangan antara sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan menjadi hambatan utama. Dukungan masyarakat dan kolaborasi lintas sektor diidentifikasi sebagai kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, meskipun akses teknologi pendidikan masih terbatas. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan sistem evaluasi dan kebijakan adaptif untuk memastikan keberlanjutan program-program pendidikan di Kabupaten Gowa.

Keywords: Pendidikan Inklusif; Kebijakan Pendidikan

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah pilar utama dalam pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Sebagai salah satu daerah yang berkomitmen untuk memajukan sektor pendidikan, Kabupaten Gowa telah mengimplementasikan berbagai program strategis guna meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Dalam konteks administrasi publik, implementasi kebijakan pendidikan diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk proses belajar mengajar, dengan memperhatikan efisiensi, efektivitas, dan keterlibatan masyarakat (Denhardt & Denhardt, 2015; Osborne, 2010).

Namun, dunia pendidikan di Gowa masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan fasilitas, ketimpangan kualitas tenaga pendidik, serta akses pendidikan yang belum merata di seluruh

wilayah. Menurut laporan Bank Dunia (2020), hanya 68% sekolah dasar di daerah pedesaan di Gowa yang memiliki akses internet memadai, dibandingkan dengan 92% di daerah perkotaan. Data lain dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa (2023) menunjukkan bahwa rasio siswa terhadap guru di sekolah terpencil mencapai 40:1, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 20:1. Selain itu, dinamika sosial dan ekonomi masyarakat turut memengaruhi vibes atau suasana dunia pendidikan di daerah ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana kebijakan publik dapat menciptakan suasana pendidikan yang mendukung pembelajaran yang berkualitas, sambil mengatasi tantangan yang ada.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Administrasi Publik

Perspektif administrasi publik dalam pendidikan menekankan pada efisiensi, efektivitas, dan partisipasi masyarakat (Denhardt & Denhardt, 2015). Penelitian oleh Osborne (2010) menunjukkan bahwa pengelolaan yang baik dalam administrasi publik berkontribusi pada peningkatan kinerja pendidikan, terutama di daerah yang memiliki sumber daya terbatas. Di Kabupaten Gowa, penerapan prinsip-prinsip ini terlihat dalam berbagai program pendidikan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas. Efisiensi dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya pendidikan ini penting untuk memastikan bahwa program-program tersebut dapat diimplementasikan secara optimal.

Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan mencakup perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal (Anderson, 2011). Penelitian oleh Fullan (2016) menegaskan bahwa kebijakan pendidikan yang responsif terhadap konteks lokal dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Di Kabupaten Gowa, kebijakan pendidikan yang diadopsi mencakup program-program yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat, seperti pengembangan kurikulum dan peningkatan kapasitas SDM. Kebijakan yang responsif sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan dan memastikan semua lapisan masyarakat mendapatkan manfaat dari program pendidikan yang dijalankan.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan pendidikan (Arnstein, 1969; Putnam, 2000). Penelitian oleh Cohen dan Uphoff (1977) menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam pendidikan dapat meningkatkan efektivitas program dan mendorong rasa memiliki terhadap pendidikan. Di Kabupaten Gowa, survei menunjukkan bahwa 68% orang tua siswa terlibat dalam kegiatan sekolah, mencerminkan dukungan kuat dari masyarakat. Keterlibatan ini penting untuk menciptakan vibes pendidikan yang positif dan membantu mengatasi tantangan, seperti distribusi tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan yang tidak merata.

Integrasi dengan Pembahasan

Ketiga aspek di atas saling terkait dan berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika pendidikan di Kabupaten Gowa. Teori administrasi publik menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan program pendidikan, yang terlihat dalam upaya pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran dan sumber daya secara optimal. Penelitian oleh Osborne (2010) yang menunjukkan peningkatan kinerja pendidikan di daerah dengan pengelolaan yang baik sejalan dengan hasil yang dicapai di Gowa.

Kebijakan pendidikan yang responsif memastikan bahwa program-program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, seperti yang diungkapkan oleh Fullan (2016). Di Gowa, kebijakan yang diadopsi mencakup berbagai program unggulan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik masyarakat, sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan.

Sementara itu, partisipasi masyarakat yang kuat, seperti yang ditunjukkan oleh studi Cohen dan Uphoff (1977), menjadi penggerak utama dalam implementasi kebijakan pendidikan. Dengan 68% orang tua terlibat dalam kegiatan sekolah, Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa dukungan masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif dan mengatasi tantangan yang ada. Dengan demikian, keberhasilan pendidikan di Kabupaten Gowa tidak hanya bergantung pada kebijakan yang baik, tetapi juga pada keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung dan mengawasi program-program pendidikan yang ada.

METODOLOGI

Metode penelitian dalam studi ini menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan panduan teori dari Creswell (2014), yang menekankan eksplorasi mendalam terhadap fenomena sosial. Penelitian ini melibatkan tiga teknik utama: pertama, wawancara mendalam yang dilakukan terhadap pejabat dinas pendidikan, guru, siswa, dan orang tua untuk menggali pandangan serta pengalaman mereka mengenai dunia pendidikan di Kabupaten Gowa. Teknik ini mengikuti model wawancara semi-terstruktur dari Patton (1990), yang bertujuan untuk menghasilkan data kualitatif yang kaya dan bermakna. Kedua, observasi lapangan dilakukan untuk mengamati secara langsung kegiatan pendidikan di berbagai sekolah, sesuai dengan prinsip yang dikemukakan oleh Spradley (1980) terkait pentingnya partisipasi pengamat dalam menangkap konteks sosial. Ketiga, analisis dokumen dilakukan untuk meninjau dokumen kebijakan, laporan dinas, dan data statistik pendidikan, sejalan dengan pendekatan analisis dokumen yang dikembangkan oleh Bowen (2009), yang menekankan pada triangulasi data guna meningkatkan validitas temuan. Kombinasi metode ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai vibes dunia pendidikan di Kabupaten Gowa, khususnya dalam perspektif administrasi publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Gowa: Kabupaten Gowa telah mengadopsi beberapa kebijakan unggulan seperti program ; Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pembinaan Perpustakaan, Program Pengembangan Kurikulum, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Daya Kesehatan Masyarakat, Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.

Kaitan program-program tersebut dengan kebijakan di bidang pendidikan dapat dilihat dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memperbaiki kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif serta berkeadilan. Berikut adalah penjelasan hubungan antara program-program tersebut dengan kebijakan di bidang pendidikan:

- 1. Program Pengelolaan Pendidikan:** Kebijakan pendidikan sering kali fokus pada pengelolaan pendidikan yang efisien dan efektif, termasuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, manajemen lembaga pendidikan, serta perencanaan anggaran pendidikan. Program ini berperan dalam memastikan pendidikan dapat berjalan dengan baik di semua jenjang pendidikan.
- 2. Program Pembinaan Perpustakaan:** Kebijakan di bidang pendidikan mendukung pentingnya literasi dan akses terhadap informasi. Program pembinaan perpustakaan berperan dalam meningkatkan budaya membaca dan memberikan akses pada sumber daya pendidikan yang relevan bagi masyarakat, terutama untuk mendukung pembelajaran di luar kelas.
- 3. Program Pengembangan Kurikulum:** Kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat adalah inti dari kebijakan pendidikan. Program ini mendukung kebijakan untuk meningkatkan kualitas pengajaran melalui pembaruan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan peserta didik dan pasar kerja.
- 4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan:** Kebijakan pendidikan banyak menekankan pada peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Program ini berfokus pada profesionalisme dan kompetensi guru serta tenaga pendidikan lainnya, untuk menciptakan kualitas pendidikan yang lebih baik.
- 5. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Daya Kesehatan Masyarakat:** Dalam kebijakan pendidikan, kesehatan peserta didik sering menjadi perhatian penting. Program ini mendukung kebijakan yang menekankan pentingnya lingkungan sekolah yang sehat, dengan menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai dan mendukung kesejahteraan fisik dan mental siswa.

- 6. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan:** Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan berkaitan dengan kebijakan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan kesehatan ke dalam kurikulum sekolah, serta melibatkan masyarakat dalam pendidikan kesehatan untuk menciptakan generasi yang lebih sehat.
- 7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan:** Kebijakan pendidikan yang menyarankan peningkatan kapasitas dalam berbagai bidang, termasuk di sektor kesehatan, mendukung program ini dengan memastikan adanya pelatihan dan pendidikan untuk tenaga kesehatan. Hal ini juga berkontribusi pada peningkatan layanan kesehatan di masyarakat.
- 8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB):** Kebijakan pendidikan yang menekankan pada penguatan pendidikan keluarga berencana (KB) bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan keluarga yang baik. Program ini sering diintegrasikan dengan pendidikan seks dan pengelolaan keluarga di tingkat sekolah atau masyarakat.
- 9. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan:** Kebijakan pendidikan yang menekankan pada kesetaraan gender memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki kesempatan yang sama dalam pendidikan. Program ini mendukung kebijakan pendidikan yang menekankan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender dalam setiap aspek pendidikan.
- 10. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA):** Dalam kebijakan pendidikan, hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas merupakan bagian yang penting. Program ini mendukung kebijakan yang memastikan pendidikan inklusif dan melindungi hak-hak anak di lingkungan sekolah, termasuk hak atas pendidikan yang bebas dari kekerasan dan diskriminasi.
- 11. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan:** Kebijakan pendidikan sering kali berkaitan dengan pengembangan potensi generasi muda untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan global. Program ini mendukung kebijakan yang fokus pada pemberian pelatihan, pendidikan keterampilan, dan pengembangan karakter bagi pemuda agar dapat berkompetisi di dunia kerja (Adnan Purichta Ichsan, 2021, hlm. 455).

Secara keseluruhan, program-program ini mendukung kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan. Kebijakan tersebut tidak hanya terbatas pada pendidikan formal, tetapi juga mencakup aspek sosial, kesehatan, dan pemberdayaan yang saling terkait.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, terutama di daerah terpencil. Namun, pelaksanaan program ini menghadapi tantangan seperti minimnya infrastruktur pendukung dan sumber daya manusia yang memadai (World Bank, 2020).

Menurut data dari OECD (2018), kabupaten dengan akses infrastruktur yang baik memiliki rata-rata partisipasi pendidikan sebesar 95%, sementara daerah yang infrastrukturnya terbatas hanya mencapai 72%. Hal ini relevan dengan kondisi di Kabupaten Gowa, di mana sekolah-sekolah di

daerah pedalaman hanya memiliki fasilitas dasar seperti ruang kelas yang layak pada 56% sekolah (Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, 2023).

Implementasi Program

- 1. Program Pengelolaan Pendidikan:** Menyusun perencanaan dan anggaran yang jelas untuk pengelolaan pendidikan, memperbaiki infrastruktur pendidikan (sekolah, fasilitas, teknologi), serta melibatkan semua pihak terkait, termasuk pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Penyusunan regulasi yang mendukung manajemen pendidikan yang lebih transparan dan akuntabel juga perlu dilakukan, seperti; Penggunaan sistem manajemen pendidikan berbasis teknologi untuk memantau dan mengelola anggaran serta kegiatan sekolah.
- 2. Program Pembinaan Perpustakaan:** Menyediakan pelatihan kepada pustakawan, memperbarui koleksi buku dan sumber daya informasi, serta mempromosikan kegiatan literasi di sekolah dan masyarakat. Kolaborasi dengan penerbit dan lembaga terkait untuk memperkaya koleksi perpustakaan juga penting. Seperti; mengadakan lomba membaca atau mengajak komunitas untuk berpartisipasi dalam kegiatan literasi di sekolah atau perpustakaan umum.
- 3. Program Pengembangan Kurikulum:** Melakukan analisis kebutuhan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman, merancang kurikulum yang berbasis kompetensi, serta melibatkan pendidik, ahli kurikulum, dan pihak terkait dalam proses pengembangan kurikulum. Seperti; Uji coba kurikulum baru di beberapa sekolah untuk menilai efektivitasnya sebelum diterapkan secara luas.
- 4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan:** Menyusun program pelatihan dan sertifikasi bagi guru serta tenaga pendidik lainnya. Peningkatan kompetensi melalui kursus atau workshop yang relevan dengan perkembangan pendidikan dan teknologi. Seperti; Program pelatihan berbasis teknologi untuk meningkatkan kemampuan pendidik dalam menggunakan alat-alat pembelajaran digital.
- 5. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Daya Kesehatan Masyarakat:** Meningkatkan fasilitas kesehatan di sekolah, memberikan edukasi tentang pola hidup sehat kepada siswa, serta menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan rutin bagi siswa. Seperti; Penyediaan fasilitas kesehatan di sekolah (posyandu sekolah) dan program makan bergizi di sekolah.
- 6. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan:** Menyediakan edukasi dan informasi kepada masyarakat tentang kesehatan dan pencegahan penyakit melalui seminar, pelatihan, atau kampanye kesehatan. Seperti; Program penyuluhan kesehatan di sekolah atau komunitas untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental dan fisik.
- 7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan:** Mengadakan pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga kesehatan melalui kursus atau program pendidikan lanjutan untuk

Suryani Jihad¹, dkk

meningkatkan keterampilan mereka. Seperti; Kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mengadakan program pelatihan profesional bagi tenaga medis dan paramedis.

- 8. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB):** Memberikan edukasi melalui pelatihan, seminar, atau penyuluhan tentang keluarga berencana di sekolah dan masyarakat. Penyediaan layanan konseling keluarga dan akses terhadap alat kontrasepsi juga perlu disediakan. Seperti; Integrasi materi keluarga berencana dalam kurikulum pendidikan keluarga dan pendidikan seks.
- 9. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan:** Menyusun kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, seperti kebijakan penerimaan siswa yang adil di sekolah. Menyediakan pelatihan pemberdayaan perempuan dan mengurangi kekerasan berbasis gender melalui pendidikan. Seperti; Mengadakan program pelatihan kepemimpinan untuk perempuan muda dan membuat kebijakan anti-diskriminasi di sekolah.
- 10. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA):** Menerapkan kebijakan yang memastikan hak-hak anak di lingkungan pendidikan, seperti hak atas pendidikan, perlindungan, dan pengawasan dari kekerasan di sekolah. Seperti; Membentuk tim pengawas di sekolah yang bertugas untuk memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan yang aman dan tanpa diskriminasi.
- 11. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan:** Menyusun program pendidikan dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja bagi pemuda. Program magang dan pelatihan teknis di berbagai industri juga dapat diperkenalkan. Seperti; Penyediaan kursus atau pelatihan yang mengajarkan keterampilan teknis dan kepemimpinan bagi pemuda, serta mengadakan lomba atau kompetisi untuk meningkatkan daya saing mereka.

Implementasi program pendidikan di Gowa menunjukkan keberhasilan dalam beberapa aspek, seperti peningkatan angka partisipasi sekolah dari 78% pada tahun 2019 menjadi 85% pada tahun 2022 (UNESCO, 2021). Namun, masih terdapat kesenjangan dalam penyediaan fasilitas pendidikan antara sekolah di perkotaan dan pedesaan. Kolaborasi antara dinas pendidikan, pemerintah desa, dan pihak swasta dinilai dapat mengurangi hambatan ini (Anderson, 2011; Creswell, 2014).

Menurut laporan UNESCO (2021), kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah berkembang. Hal ini sejalan dengan praktik di Gowa yang telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pendidikan.

Vibes Dunia Pendidikan: Dukungan masyarakat menjadi salah satu kekuatan utama dalam menciptakan vibes pendidikan yang positif. Berdasarkan survei yang dilakukan pada 300 orang tua siswa di Gowa, 68% menyatakan bahwa mereka terlibat dalam kegiatan sekolah seperti rapat komite dan gotong royong. Keterlibatan aktif masyarakat terlihat dari kegiatan gotong royong dalam membangun fasilitas sekolah dan pengawasan terhadap mutu pendidikan. Di sisi lain, ketimpangan dalam distribusi tenaga pendidik dan fasilitas masih menjadi hambatan utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang merata (Denhardt & Denhardt, 2015).

Implementasi teknologi pendidikan, seperti penggunaan platform daring untuk pembelajaran, telah menunjukkan potensi besar dalam mendukung proses belajar mengajar, meskipun masih terkendala oleh infrastruktur internet di beberapa wilayah. Data dari Dinas Pendidikan menunjukkan bahwa hanya 43% sekolah di pedesaan yang memiliki akses komputer dan internet yang memadai (Pemerintah Kabupaten Gowa, 2023). Penelitian sebelumnya oleh Sung et al. (2020) menegaskan pentingnya teknologi sebagai alat untuk memperluas akses pendidikan, khususnya di daerah dengan keterbatasan geografis.

Peran Administrasi Publik: Administrasi publik di Kabupaten Gowa telah menunjukkan upaya yang progresif dalam mendukung pendidikan melalui perencanaan kebijakan yang adaptif dan berbasis data. Misalnya, pengalokasian anggaran untuk program pelatihan guru mencapai Rp12 miliar pada tahun 2022, meningkat dari Rp9 miliar pada tahun sebelumnya (Pemerintah Kabupaten Gowa, 2023). Namun, masih diperlukan penguatan sistem evaluasi untuk memastikan keberlanjutan program-program ini (World Bank, 2020; Osborne, 2010).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Gowa telah mengimplementasikan berbagai kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Program-program unggulan seperti Pengelolaan Pendidikan, Pembinaan Perpustakaan, Pengembangan Kurikulum, dan Peningkatan Kapasitas SDM memberikan kontribusi positif dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Meskipun terdapat kemajuan, seperti peningkatan angka partisipasi sekolah dari 78% pada tahun 2019 menjadi 85% pada tahun 2022, masih ada tantangan yang signifikan, terutama dalam hal infrastruktur dan distribusi sumber daya manusia. Kesenjangan antara sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan tetap menjadi hambatan dalam mencapai pendidikan yang merata.

Dukungan masyarakat dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif. Namun, implementasi teknologi pendidikan masih terhambat oleh keterbatasan akses internet dan fasilitas di luar kota. Oleh karena itu, administrasi publik diharapkan untuk terus memperkuat kebijakan dan sistem evaluasi agar program-program pendidikan dapat berkelanjutan dan efektif dalam meningkatkan kualitas administrasi publik dan pendidikan di Kabupaten Gowa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Purichta Ichsan. (2021). *RPJMD Gowa Koreksi Hasil Evaluasi*.
Anderson, J. E. (2011). *Public Policymaking: An Introduction*. Wadsworth Cengage Learning.
Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Planning Association*, 35(4), 216-224.

- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. Routledge.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa. (2023). Data Statistik Pendidikan Kabupaten Gowa. Pemerintah Kabupaten Gowa.
- Pemerintah Kabupaten Gowa. (2023). Laporan Tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa.
- OECD. (2018). *Education Policy in Indonesia: Policy Insights and Recommendations*. OECD Publishing.
- Osborne, S. P. (2010). *The New Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance*. Routledge.
- Patton, M. Q. (1990). *Qualitative evaluation and research methods* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon and Schuster.
- Sung, Y. K., et al. (2020). The Role of Technology in Advancing Inclusive Education: Insights from Case Studies. *Educational Technology Research and Development*, 68(3), 153-167.
- UNESCO. (2021). *Reimagining Our Futures Together: A New Social Contract for Education*. UNESCO Publishing.
- Spradley, J. P. (1980). *Participant observation*. Holt, Rinehart and Winston.
- World Bank. (2020). *Education Sector Analysis in Indonesia: A Focus on Equity and Efficiency*. World Bank Publications.